LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS PROFESIONALISME SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT

Oleh :

Dr. Paiman Raharjo,M.Si

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA, 2016

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PROF.DR.MOESTOPO (BERAGAMA)

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PENELITIAN	:ANALISIS PROFESIONALISME SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT
Oleh	: Dr. Paiman Raharjo,M.Si

Jakarta, Januari 2016

Kapuslitdianmas Program Pascasarjana Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama)	Direktur Program Pascasarajana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Ir.Enisar Sangun,M.Sc.,Ph.D	Dr. Paiman Raharjo,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul " **Analisis Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat"**, ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditugaskan kepada dosen.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu telaksananya penelitian ini, khususnya kepada jajaran pimpinan Program Pascasarjana Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) yang telah membiayai sepenuhnya penelitian ini.

Akhir kata, peneliti mengharapkan kiranya hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2016
Penulis

Dr. Paiman Raharjo,M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 6
D. Perumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Kegunaan Penelitian 7
G. Sistematika Penulisan 8
BAB II : LANDASAN TEORI 10
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Deskripsi Teori 14
1. Pengertian Administrasi 14
2. Pengertian Manajemen 18
3. Pengertian Organisasi 19
4. Pengertian Profesionalisme 23
5. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 38
6. Pelanggaran Ketertiban 39
C. Kerangka Pemikiran 41
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Metode Penelitian 43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 43
C. Fokus Penelitian 44

Halaman

D. Unit Analaisis dan Informan 44
1. Unit Analaisis 44
2. Informan 45
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisis Data 46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Hasil Penelitian 48
1. Dasar Hukum Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja 48
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 51
B. Pembahasan 57
1. Peranan Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah 57
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan Upaya Dalam Mengatasi Masalah 61
3. Profesionalisme Satpol PP Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan 67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga pada intinya mendambakan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat agar lingkungan yang ditinggalinya bebas dari hal-hal yang merugikan warga. Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sangat diutamakan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dikarenakan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah unsure yang menangani tentang ketertiban dan keamanan lingkungan Problem sosial seperti tekanan ekonomi berakibat pada sulitnya masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kondisi yang demikian mengakibatkan masyarakat berperilaku nekad. Dilain pihak adanya upaya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam meminimalkan pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005, bahwa ketertiban lingkungan merupakan hal yang sangat penting, sebab dergan lingkungan yang tertib dan aman akan menimbulan suasana kehidupan yang nyaman dan harmonis bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Dengan lingkungan

yang tertib kita akan menjadi nyaman untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di zaman sekarang ini, ketertiban lingkungan menjadi sorotan yang sangat tajam di lapisan masyarakat, mengingat banyaknya permasalahan tentang ketertiban lingkungan yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti : tawuran, kebut-kebutan, balapan liar, maraknya pedagang kaki lima dan aksi corat-coret pada fasilitas umum yang disediakan pemerintah.

Masyarakat umumnya sadar akan pentingnya ketertiban lingkungan, namun apa daya seringkali masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa tatkala terjadi gangguan ketertiban yang dilakukan oleh sekelompok orang atau ormas besar, yang kerapkali aksi yang dilakukan dibarengi dengan tindakan anarkis dan perusakan. Tindakan yang meresahkan ketertiban masyarakat tersebut, seringkali tidak dibarengi dengan sigapnya penanganan dari aparat kepolisian maupun satuan pamong praja stempat, sehingga pelanggaran terhadap ketertiban lingkungan kerapkali terjadi secara berulang-ulang. Kondisi tersebut juga seringkali terjadi di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dengan bentuk-bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti : 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2) Penipuan,3)Pencurian hewan ternak, 4) Perkelahianan tarwarga dan, 5) Pencurian kendaraan bermotor.

Terhadap bentuk-bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban tersebut, upaya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat di Kecamatan Kalideres memili beberapa program yaitu: 1) Pengaktifan kembali Siskamling, 2) Penerangan pada wilayah-wilayah rawan pencurian, 3) Penyuluhan Hukum dan, 4) Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) tentang sadar hukum dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban tersebut, terdapat hambatan yang dialami Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kecamatan Kalideres antara lain : 1) Kurangnya kesadaran warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban, 2) Kurangnya pemahaman warga tentang hukum, 3) Keterbatasan Pegawai Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kecamatan Kalideres, dan, 4) Pandangan negatif warga kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kecamatan Kalideres.

Terhadap upaya penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan, saat ini pola perilaku masyarakat masih menggunakan pola prilaku yang lama, bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat tampaknya belum sadar pada dampak yang akan ditimbulkan jika pola perilaku mereka

tidak berubah, maka keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tidak akan pernah bisa terselesaikan.

Pola perilaku masyarakat semestinya sudah berubah, tapi kenyataannya sulit dilakukan perubahan perilaku masyarakat. Namun pada dasarnya, pola perilaku masyarakat dapat berubah jika masyarakat diberi informasi tentang manfaat dan dampak dari ketertiban lingkungan yang kondusif dan nyaman. Dengan adanya partisipasi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pola perilaku masyarakat. Masyarakat yang telah diberi informasi akan lebih menyadari kesalahan apa saja yang mereka perbuat dan mereka pun akan menjadi lebih peduli terhadap masalah ketertiban lingkungan. Namun kenyataan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lingkungan masih rendah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap pun masih rendah

Dengan kenyataan-kenyataan yang penulis kemukakan di atas, menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penanganan ketertiban lingkungan belum berjalan dengan baik, terarah dan berkesinambungan, oleh karena itu perlu dicari solusi atau pemecahannya yang tepat.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut diatas melatar belakangi penulis untuk mengkaji dalam penelitian yang berjudul :

"Analisis Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat didefinisikan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap ketertiban dan keamanan di Kecamatan Kalideres masih rendah.
2. Koordinasi dalam penanganan ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres masih lemah.
3. Tingkat propfesionalisme satpol pp belum merata dan maksimal
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan ketertiban lingkungan masih rendah.
5. Banyaknya faktor-faktor yang menghambat Satpol PP dalam penegakkan Perda di Kecamatan Kalideres.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada profesonalisme satuan polisi pamong praja dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada odentifikasi dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitan ini adalah :

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghabat Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan?
3. Bagaimana tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dengan ketertiban dan keamanan lingkungan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghabat Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dengan ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Untuk mengetahui tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dalam kaitannya menjaga ketertiban lingkungan.
2. Kegunaan bagi dunia akademis

   Dapat memberi masukan kepada almamater atau program studi yang berkaitan dengan perspektif akademis (berhubungan dengan kurikulum dan proses belajar mengajar).
3. Bagi ilmu pengetahuan mengembangkan ilmu pengetahuan dimana data yang dikumpulkan diukur, dibandingkan dan analisa yang akan memberikan dampak bagi pengembangan

ilmu pengetahuan baik secara umum maupun khusus terhadap pengetahuan yang dijadikan dasar penulisan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam V (lima bab), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengutarakan penelitian terdahulu, deskripsi teori yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, tipe penelitian, populasi dan sampel, jenis instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menerangkan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan pembahasan terhadap perumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian Syarifudin (2011:98) yang berjudul " Peranan Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur".

   Dari hasil peneilitian tersebut, disimpulkan bahwaperanan satuan polisi pamong praaja sangat penting. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya peran dan kemampuan satpol pp, tugas kegiatan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban dapat dijalankan dengan baik, yang akhirnya berdampak pada terwujudnya ketertiban dan kemanan lingkungan yang nyaman, kondusif dan harmonis. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yakni Sukirno Ketua RT 05 RW 04 (21-12-2010) bahwa dengan keberadaan satuan polisi pamong praja di wilayahnya, sangat berperan sekali dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

2. Penelitian Juheriyah (2010:103) yang berjudul " Analisis Tingkat Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban Lingkungan di Kelurahan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat".

   Penelitian Juheriyah tersebut menganalisa sejauhmana tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja memberikan kontribusi dalam menciptakan ketertiban lingkungan. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa indikator profesionalisme seperti : kemandirian, kemampuan, kemauan, tanggung jawab dan sikap satuan polisi pamong praja sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan ketertiban lingkungan.

   Dari hasil wawancara dengan Kasat Satuan Pamong Praja Jakarta Pusat (Sulistyo,21 Januari 2010), bahwa dengan kemandirian dan kemampuan yang dimiliki satuan polisi pamong praja memberikan kepercayaan diri bagi anggota Satpol PP dalam menjalan tugas sehari-hari, sehingga ketertiban lingkungan dapat diwujudkan secara kondosif dan harmonis.

3. Penelitian Bastaman (2012:96) yang berjudul "Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Matraman Jakarta Timur".

   Hasil penelitian Bastaman ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana tingkat profesionalisme satuan polisi

pamong praja berperan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja di Kecamatan Matraman cukup merata, sehingga memberikan dampak yang positif dalam kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan.

Dengan tingkat profesiolisme yang dimiliki satuan polisi pamong praja seperti kemampuan dan kemandirian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan, ternyata sangat didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini terbukti dari hasil wancara dengan Ketua Siskomas Kecamatan Matraman (Wahano, 24 Maret 2012) yang mengatakan bahwa tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja sangat menentukan terhadap keberhasilan organisasi. Di Kecamatan Matraman tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja sangat baik, hal ini ditenggarai dengan tindakan yang sigap, cepat dan handal setiap aduan dari masyarakat terkait dengan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan. Di wilayah Kecamatan Matraman cukup rawan dengan aksi tawuran warga dan pelajar, tapi berkat kesigapan dan profesionalisme anggota Satpol PP yang mampu bekerjasama dengan Polsek, Koramil dan tokoh-tokoh

masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan dapat diatasi.

4. Penelitian Sutarman (2013:105) yang berjudul "Peranan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat".

   Dari penelitian yang dilakukan Sutarman menjelaskan bagaimana tingkat profesionalisme satuan polisi pamong praja dapat berperan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa profesionalisme satuan polisi pamong praja sangat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Menteng Jakarta Pusat (Bondan, 12 Oktober 2012), diperoleh keterangan bahwa profesionalisme satuan pamong praja akan membentuk jiwa korp kesatuan yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan. Dengan kemampuan dan kemandirian yang dimiliki salpol pp merupakan modal besar dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang kondisif, tertib dan aman.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori menguraikan tentang kajian teori, konsep dan definisi yang sesuai dengan tema penelitian. Tinjauan teori dan konsep yang dimaksud adalah untuk menjelaskan berbagai teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka teori-teori yang relevan dalam penulisan ini dapat diuaraikan sebagai berikut :

1. Pengertian Administrasi

Subandri S. Hardhoyo (1997:6) dalam bukunya Dasar-asar Manajemen Perkantoran mengemukakan pengertian administrasi dalam arti sempit dan luas :

Administrasi dalam arti sempit :

> Administrasi dalam arti sempit meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, mengetik, pengagendaan, pengarsipan dan lain sebagainya yang bersifat Teknis Ketatausahaan (*Clerical Work*).

Administrasi dalam arti luas : Administrasi dalam arti luas adalah merupakan proses kerja sama daripada sekelompok manusia dengan cara-cara berdaya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya pengertian administrasi dalam arti luas menurut Subandri S. Hardhoyo (1997:7) dapat dilihat dari tiga sudut yaitu :

a. Administrasi dalam arti Proses, yaitu keseluruhan kegiatan penyelenggaraan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan kerja sama.
b. Administrasi dalam arti Fungsional, adalah segala kegiatan yang dijalankan dalam proses administrasi dan manajemen, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara fungsional.
c. Administrasi dalam arti Institusi (kelembagaan), adalah keseluruhan orang-orang baik secara perorangan maupun secara bersama-sama yang menjalankan kegiatan-kegiatan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sondang P. Siagian (1997:37) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Di dalam Buku Petunjuk Administrasi Fakutas pada Universitas Gajah Mada yang dikutip oleh Subandri S. Hardhoyo dikemukakan beberapa pengertian administrasi, yang antara lain : Administrasi adalah suatu aktivita atau proses yang terutama bersangkutan dengan cara menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi adalah proses yang lazim terdapat dalam segenap, usaha bersama, baik usaha pemerintah atau swasta, sipil atau militer, baik besar maupun kecil.

Administrasi adalah pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar melaksanakan suatu tujuan khusus.

Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Subandri S. Hardhoyo mengutip dari J. Wayong (1997:3) dalam bukunya Fungsi Administrasi Negara mengemukakan bahwa : Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan dapat tercapai.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan unsur-unsur administrasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Soekarno K (1999:12) mengemukakan : Administrasi Negara adalah administrasi yang berobyek kenegaraan atau kepenetingan umum. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan umum dalam suatu Negara.

Lebih lanjut Soekarno (1999:13) mengatakan bahwa Administrasi Pemerintahan Negara adalah semua tindakan yang dilakukan dan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam rangka memberikan Pelayanan kepada kepentingan rakyat.

Menurut Siagian (1997:3), dalam bukunya: "Filsafat Administrasi", pengertian Administrasi dalah sebagai berikut : "Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1996:29), dalam bukunya "Ilmu Administrasi" : "Administrasi adalah rangkaian atau proses pengendalian cara atau sistem kerjasama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan."

Ulbert Silalahi (1992:5), mengemukakan bahwa : "Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain"

The Liang Gie (1990:21) dalam bukunya "Unsur-unsur Administrasi" mengatakan sebagai berikut : Administrasi sebagai rangkaian perbuatan manusia dapat dibedakan dalam 8 pola perbuatan :

a. Organisasi.
b. Manajemen.
c. Tata hubungan.
d. Kepegawaian.
e. Keuangan.
f. Perbekalan.
g. Ketatausahaan
h. Perwakilan.

2. Pengertian Manajemen

George. R. Terry dalam bukunya "principles of management" yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1995:42) dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" mengatakan bahwa :

> "Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, organisasi, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Pengertian di atas, menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Aripin Abdurrachman (1997:17), yang menjelaskan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas

b. Proses, yakni kegiatan-kegiatan dalam rentetan urusan-urusan

c. Orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa untuk mendapatkan hasil berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas haruslah melalui orang lain. Yang dimaksud orang lain disini adalah orang-orang pelaksana atau orang-orang yang menjadi subjek pelaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan alat yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan administrasi. Tanpa adanya manajemen yang baik, segala tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan mungkin akan tercapai, maka dapat dikatakan juga bahwa manajemen merupakan hakikat daripada administrasi.

3. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Unit sosial ditandai oleh : perencanaan yang sampai tingkat tertentu disusun secara sadar (misalnya : anggaran belanja keluarga), pusat-pusat kekuasaan (misalnya: kepala suku), serta oleh sistem keanggotaan

yang dapat diganti (misalnya: melalui perceraian). Tetapi sampai seberapa jauh unit-unit sosial tersebut direncanakan secara sadar, dan dibentuk secara hati-hati dengan penuh pertimbangan dan mempunyai sistem kenggotaan yang secara rutin dapat diganti, pada hahekatnya tidak menonjol dibandingkan dengan unit-unit sosial yang dinamakan organisasi. Dengan demikian organisasi akan lebih menekankan kepada masalah pengendalian terhadap ciri/sifat maupun tujuannya, sedangkan pada pengelompokan sosial lain tidak begitu terasa.

Menurut Handayaningrat (1996:42), organisasi secara singkat atau praktis dapat dikatakan merupakan suatu wadah atau alat kegiatan orang-orang bekerja sama. Berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana pendapat Handayaningrat bahwa "Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan".

Sementara menurut Poerwadarminto (1994:707) dalam kamus besar bahasa Indonesia organisasi memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan pengertian di atas robbins (1992:2) mengemukakan bahwa organisasi adalah: kesatuan sosial yang

dikordinasikan secara sadar,dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Pendapat lain tentang organisasi, Weber dalam Thoha (1994: 21) mengatakan bahwa : Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur,didalamnya berisi wewenang,tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu.

Lebih jauh dalam hal organisasi, hakikat dasar yang terpenting kaitannnya dengan organisasi yang bersifat dinamis adalah organisasi merupakan suatu system sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh davis (1985:11) dalam hal organisasi, asumsi yang paling penting adalah bahwa organisasi merupakan sistem sosial dan dibentuk atas dasar kepentingan bersama.

Kemudian kepentingan bersama itu sendiri didasarkan bahwa organisasi dibentuk dan dipertahankan atas dasar kebersamaan kepentingan diantara anggotanya serta organisasi dipandang sebagai sarana untuk membantu mencapai tujuan anggotanya serta sebaliknya organisasi membutuhkan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Toha (1994:116) Organisasi pada umumnya dilandasi oleh ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggunga jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara tradisional, melainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih menigkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.

b. Adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mempengaruhi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengesahkan organisasi mencapai tujuannya. Pusat kekuasaan harus secara kontiyu melengkapi sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efesiensi.

c. Pengantian tenaga

Dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan, dapat diganti oleh tenaga yang lain, demikian pula organisasi dapat mengkombinsikan lagi anggotannya melalui proses pengalihan maupun formasi.

Melihat organisasi merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan tertentu, maka hakekat organisasi adalah mengejar tujuan tetapi apabila organisasi sudah terbentuk, organisasi akan mempunyai kebutuhan sendiri dan semua ini

kadang-kadang menyebabkan organisasi akan tunduk kepada kebutuhan tersebut.

Tujuan organisasi mencakup bekerja fungsi, diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang senatiasa berusaha di kejaaaar dan di wujudkan oleh organisasi, dengan demikian tujuan organisasi tersebut menciptakan pula sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi. Tujuan juga merrupakan sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegitan organisasi, seerta tentunya eksistensi organisasi itu sendiri. Tujuan lain organisasi adalah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah dan kerangka hubungan yang berstruktur, yang menjalankan fungsi tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.

4. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme" memiliki banyak pengertian, yang masing-masing menyoroti aspek dan penekanan yang relatif berbeda.

Pengertian profesionalisme yang diajukan oleh masing-masing pengamat didasarkan pada hasil penelitian dan atau pengamatan. Namun pada dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen profesionalisme yaitu terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan perilaku (*personal attributes*). Secara umum, profesionalisme adalah tingkat keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi.

Untuk profesional berasal dari kata kerja latin *pro feteri* dan terbentuklah kata profesi yang diartikan sebagai pekerjaan rutin dimana setelah menjalani pendidikan khusus, orang yang bersangkutan meluangkan waktu dan tenaganya serta mendapatkan sumber nafkah dari pekerjaan yang dia lakukan.

Adapun profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *Profesionalisme* yang secara fleksikal berarti sifat profesional. Dimana orang profesional memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain, meskipun mengerjakan pekerjaan yang sama.

Menurut W.J.S. Poerwadarminto (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976, hal 1088), profesional dalam bahasa jawa ialah cekatan, cakap mengerjakan sesuatu.

Sedang menurut Malayu Hasibuan (2000:92) profesionalisme adalah; cekatan, kecakapan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian).

Boyatzis dalam Rosemary dan Paul Sparrow (1992; 103) yang memberi batasan profesionalisme secara luas yaitu sebagai sesuatu yang mendasari karakteristik seseorang. Profesionalisme dapat berupa "suatu motif, sifat, keterampilan, aspek *self – image* seseorang atau peran sosial, ataupun suatu pengetahuan yang digunakan oleh seseorang. Sedangkan Hornby dan Thomas (1989; 63) mendefinisikan profesionalisme sebagai "pengetahuan, keterampilan dan kualitas dari manajer/pemimpin yang efektif". Lebih lanjut kedua penulis tersebut menguraikan profesionalisme sebagai gambaran dari bagian-bagian kinerja yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan : "apa yang harus dikerjakan oleh pegawai, dan apa yang dikerjakan dengan baik, efektif dalam berbagai macam aspek dari pekerjaan mereka".

Amstrong dan Baron (1998; 202) menggambarkan apa yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan memberikan perhatian pada akibat (*effect*) daripada usaha (*effort*) dan pada output daripada input. Selanjutnya, kata *competency* mengacu pada dimensi-dimensi perilaku sehingga sering disebut profesionalisme perilaku (*behavioral competencies*)

karena dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang berperilaku ketika mereka melakukan perannya dengan baik.

Spencer (1993; 132) mengemukakan pengertian profesionalisme sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan *criterion-referenced effective* dan/atau kinerja yang tinggi sekali dan suatu pekerjaan atau situasi. Karakteristik dasar berarti profesionalisme itu merupakan bagian dari kemampuan untuk bertahan dari kepribadian seorang dan dapat memprediksi perilaku dalam situasi dan pekerjaan yang lebih luas. Hubungan sebab akibat berarti adanya profesionalisme yang menyebabkan atau memprediksikan perilaku dan kinerja. Sedangkan *criterion referenced* berarti bahwa profesionalisme pada dasarnya memprediksikan siapa yang kinerjanya baik atau jelek, seperti diukur pada kinerja yang spesifik atau standar.

Selanjutnya Spencer (1993;137) memberikan lima tipe karakteristik dasar dari profesionalisme, yaitu :

a. Motif (*motive*)

Sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Motif ini "menggerakkan, mengarahkan dan memilih" perilaku

terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda dari orang lainnya.

b. Sifat (*traits*)

Karakteristik fisik dan responden yang konsisten terhadap situasi dan informasi.

c. Konsep pribadi (*self-concept*)

Perilaku, nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang.

d. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu.

e. Keahlian (*skill*)

Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mental tertentu.

Secara hubungan sebab akibat, definisi profesionalisme dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 2.1
Karakteristik Dasar dari Profesionalisme

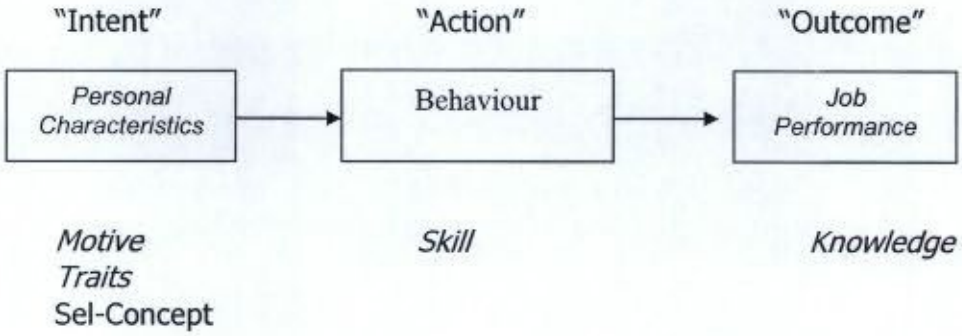

Sumber : Spencer, Organizational Behavior, 1993

Sedangkan hubungan kausalitas mengenai profesionalisme yang dirumuskan oleh *Civil Service College* (1994; 191) dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.2

Hubungan Kausalitas Profesionalisme

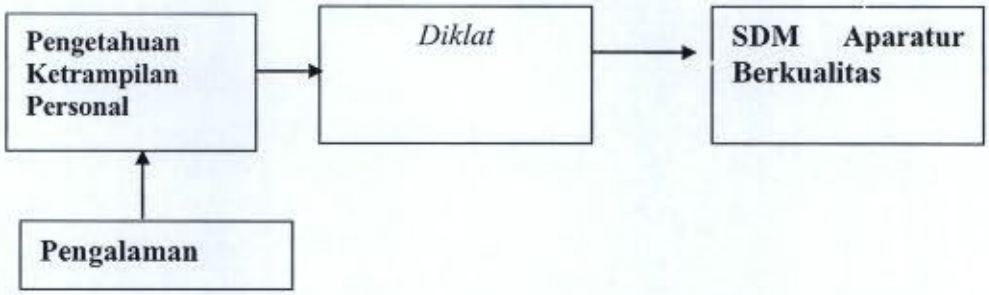

Sumber : Civil Service College, *Behavior in Organizational*, dalam Simanjuntak Payaman J, 1991

Sementara itu, Umar Husen, (2000; 103), mengatakan bahwa profesionalisme merupakan kinerja tugas rutin yang integratif yang menggabungkan *resources* (*skill*, pengetahuan, asset dan proses, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat) yang menghasilkan posisi yang lebih tinggi dan kompetitif.

Menurut Lawton & G.Rose (1994;193) profesionalisme itu sendiri dapat berupa keahlian, pengetahuan, pengertian/pemahaman, dan nilai-nilai. Sedangkan menurut Nainggolan (1983;101) jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

seseorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. Dari pengertian di atas dapat dikembangkan pengertian profesionalisme jabatan sebagai kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai baik pengetahuan, keahlian/ketrampilan dan nilai-nilai untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya dalam suatu organisasi.

Berbicara jabatan berarti berbicara tentang posisi/kedudukan dalam suatu organisasi. Jabatan sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Oleh karena itu profesionalisme jabatanpun tidak terlepas dari pola profesionalisme yang harus dimiliki seorang pemimpin sesuai dengan tingkat jabatannya masing-masing.

Ketika mendefinisikan profesionalisme pada perilakunya, dapat diklasifikasikan dalam beberapa area yang harus diikuti sebagai berikut:

a. Mengetahui apa yang perlu untuk dikerjakan : alasan yang kritis, kemampuan strategis, *business know-how*
b. Mengerjakan semua tugas-tugas: mengarahkan pencapaian, pendekatan yang proaktif, kepercayaan, kontrol, fleksibilitas, mementingkan efektivitas, persuasi, pengaruh.
c. Mendorong pihak lain untuk bekerja sama : memotivasi, kemampuan antar personal, perhatian terhadap hasil, persuasi, dan pengaruh.

Untuk mencapai suatu profesionalisme tertentu, seseorang perlu memiliki sejumlah kapabilitas. Kapabilitas ini biasanya merupakan kombinasi dari dimensi sifat pribadi, keterampilan dan pengetahuan.

a.Sifat-sifat pribadi (*personal attributes*), yang merupakan karakteristik dan kualitas seseorang yang dibawa ke tempat kerja seperti kejujuran, empati, stamina dan lain-lain.

b.Keterampilan (*skills*) merupakan ketrampilan kerja yang dibutuhkan dalam bidang tugas masing-masing seperti mengoperasikan mesin, kejelasan dan keberanian dalam menulis, memaparkan, memeriksa kendaraan dan lain-lain.

c. Pengetahuan (*knowledge*), dibutuhkan seseorang untuk menerapkan atribut/sifat dan keterampilannya secara efektif, seperti latar belakang kebijaksanaan, pemahaman konteks, persyaratan yang sah, tujuan bisnis dan lain-lain.

Kecakapan yang dimaksudkan boleh didasarkan kepada motif, trait, sikap atau nilai, tahap pengetahuan atau pemikiran (*kognitif*) atau kemahiran bertingkah laku. Kesemua ciri ini boleh dijadikan petunjuk atau indikator untuk menilai tahap prestasi para pekerja sama ada berada pada tahap prestasi tertinggi, dan diantara efektif atau tidak efektif.

Hubungan antara profesionalisme dengan tahap prestasi atau pencapaian boleh dilihat melalui Model Sebab Akibat profesionalisme. Model profesionalisme ini terbagi kepada tiga (3) bagian yaitu Tujuan, Tindakan dan output yang mana kelima-lima ciri tadi dirangsang dengan tingkah laku atau kemahiran tertentu akan menghasilkan hasil-hasil tertentu. Sebagai contoh, motivasi ke arah pencapaian yang akan diikuti dengan tingkah laku-tingkah laku dalam suatu organisasi yaitu : usaha pencapaian, sikap bertanggungjawab kepada hasil dan mengambil keputusan yang efektif akan kemungkinan resiko-resiko.

Dalam usaha untuk mengidentifikasikan secara pasti akan teras-teras kecakapan yang perlu dilaksanakan pimpinan pada sebuah organisasi, satu model telah dibentuk. Model ini terbagi kepada tiga bagian yaitu Pencapaian, Pemilihan dan Penganalisaan, dan Bekerja dengan Manusia. Kecakapan dalam teknikal dan kefungsian juga penting tetapi akan secara langsung terkandung dalam ketiga bagian-bagian tadi :

1) Pencapaian

Memandu kepada organisasi secara jelas apakah yang perlu dicapai dan menangani segala kekang dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi. Mencari dan memikirkan

usaha-usaha yang perlu untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut melalui perencanaan yang teliti dan pengorganisasian.

2) Pemilihan dan Penganalisaan

Pemikiran kritis merupakan asas kepada manusia memahami sesuatu isu dan mencari rumusan. Bagaimanapun pemikiran konstruktif juga penting karena hal tersebut akan menajadi pemandu (*guiding*) kepada pemahaman yang luas tentang sesuatu isu dan juga menilai akan implikasi sesuatu keputusan diambil. Penganalisaan juga penting dalam usaha untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan hal lain yang melingkupinya. Kedua-dua ini memandu kepada pembuatan keputusan yang lebih baik dan akuntabel.

3) Bekerja dengan Manusia

Mewujudkan satu hubungan interpersonal yang baik dan menggalakkan komunikasi dua arah dan membina hubungan personal dalam organisasi dan komitmen kepada subordinat. Selalu meyakinkan subordinat dengan memberi penghargaan kepada prestasi kerja dalam satu organisasi dan selalu meningkatkan kualitas output yang dihasilkan. Pertemuan yang intensif akan meningkatkan hubungan komunikasi dan juga dapat memacu para subordinat untuk memberi sumbangan secara efektif.

Terdapat sejumlah profesionalisme yang harus dikuasai seorang pemimpin untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Profesionalisme yang diperlukan ini terkandung dalam enam (6) kumpulan utama kecakapan yang meliputi :

1). Kecakapan dalam Pencapaian dan Tindakan.

Motivasi Pencapaian kebolehan atau berupaya untuk melakukan tugas sempurna mungkin atau berupaya mengatasi standard kecemerlangan Arahan dan Kualitas Kerja berupaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan dengan melakukan banyak pemantauan, pemeriksaan dan memastikan semua situasi berada dalam keadaan sistematik. Inisiatif berupaya dengan sendiri untuk mengambil tindakan, memperbaiki mutu kerja atau menciptakan peluang-peluang kecemerlangan. Peka terhadap Maklumat senantiasa mencari Maklumat yang spesifik dan terperinci untuk mengetahui sedalam-dalamnya sesuatu masalah atau isu tertentu.

2). Kecakapan Kemahiran Membantu dan Pemuasan

Hubungan interpersonal, upaya untuk mendengar, memahami dan memberi reaksi terhadap setiap pemikiran, pandangan atau perasaan, orientasi Kepuasan, senantiasa membantu atau meladeni setiap keperluan masyarakat.

3). Kecakapan Untuk Meyakinkan

Kemahiran meyakinkan mempunyai satu kebolehan untuk memberi kesan atau dampak kepada orang lain, membujuk, meyakinkan, memberi arahan kepada orang lain untuk sama-sama mengambil tindakan. Kepekaan Organisasi, kebolehan untuk memahami dan menggunakan dinamik politik di antara organisasi.

4). Kecakapan Pengelolaan

Membina dan menambah kecakapan berrkemampuan mengambil tindakan secara cepat dan akurat untuk menambah kemahiran dan kemampuan setiap pimpinan dalam organisasi. Arahan berkemampuan untuk menyampaikan atau memerintah pegawai tentang apa yang perlu diselesaikan.

e) Kecakapan Pemikiran / Kognitif

Pemikiran analitikal berkemampuan untuk memahami situasi dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan menjadikannya kepada beberapa bagian dan memikirkan secara sistematik dan logik. Kemampuan pemikiran konseptual dalam menghubungkan kaitan atau corak di antara sesuatu situasi dengan isu-isu utama dan situasi yang kompleks.

f) Kecakapan Pembawaan Diri

Kepercayaan diri yang merupakan asset apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang menyentuh perasaan atau situasi stress. Keyakinan diri merupakan kepercayaan dalam memilih cara/pendekatan terbaik dalam melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu tugas, terutama dalam keadaan yang mendesak. Keluwesan merupakan kemampuan untuk mengadaptasi, bekerja secara baik dalam pelbagai situasi, berbagai kelompok dan individu.

Profesionalisme merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan hasil kerja, dengan perkataan lain sejauhmana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan atau profesionalisme yang dimiliki.

Kemampuan atau profesionalisme seperti yang dimaksud di atas dapat berkembang secara bertahap. Menurut kajian Hebert L. Dreyfus dan Start L. Dreyfus seperti diterangkan Bennet Silalahi (Performance Appraisal, 1998 hal 32) yaitu ; perkembangan kemampuan atau profesionalisme manusia paling sedikit lima tahap. Dari tahap baru mengetahui (novice) sampai ke tahap "ahli" (*expert*). Kebolehan yang dapat dikembangkan yaitu yang tidak berbentuk seperti berpikir, berangan – angan, suka dan tidak suka.

Sedangkan kebolehan yang berbentuk seperti pertimbangan, analisis keputusan, pemecahan masalah dan mengatasi konflik. Kedua jenis kebolehan ini berkembang menurut kapasitas tenaga kerja menyerap dan mengolah informasi dan mengalihkan kemampuan berpikir menjadi gerak motorik, kelima tahap perkembangan kemampuan ini dapat diatur sebagai berikut :

1) Tahap I : baru mengetahui (*novice*) pada ini tenaga kerja mengetahui prinsip dan prosedur suatu pekerjaan dalam konteks yang bebas yakni akibat sesuatu kegiatan, tetapi belum mampu menerapkannya.
2) Tahap II: pemula (*beginner*) seseorang pemula menerapkan apa yang diketahuinya dengan bantuan suatu matriks kerja dan seseorang pengawas belum dapat dilepas tanpa akibat suatu konsekuensi atau resiko yang merugikan.
3) Tahap III : cakap dan tangkas (*competence*) tenga kerja tidak memerlukan lagi matriks dan pengawas. Sudah mampu menggunakan inisiatif untuk memperkaya atau meningkatkan mutu pekerjaanya. Untuk mencapai tingkat yang cakap dan tangkas memerlukan waktu untuk belajar.
4) Tahap IV : mahir (*proficiency*), seseorang pekerja yang mahir tidak lagi memerlukan petunjuk tertulis maupun lisan. Bahkan sudah dapat membaca situasi dan menarik kesimpulan sendiri

dan dapat membuat pilihan dari berbagai alternatif. Intuisinya sudah mulai berkembang maupun berpikir secara kritis dan analitis.

5) Tahap V : ahli (*expertise*), seseorang pekerja ahli memahami apa yang akan dilaksanakan berdasarkan pengertian dan pengalaman. Keahliannya sudah merupakan intuisi tanpa disadari alat – alat perlengkapan sudah merupakan bagian dari tubuhnya dan sudah kreatif.

Peningkatan profesionalisme seseorang menurut Bennet Silalahi (1998:131) tidak terlepas dari : Kesediaan sumber daya alam; Percepatan perkembangan ilmu dan teknologi; dan Penyesuaian keterampilan dan adat istiadat.

Bennet Silalahi menyatakan bahwa profesionalisme dapat diukur melalui : tingkat kemandiriannya, kemampuannya, kemauannya, tanggung jawabnya dan sikapnya. Yang dimaksud dengan kemandirian, kemampuan, kemauan, tanggung jawab dan sikap dari tenaga Aparatur sebagai berikut :

1) Kemandirian adalah tingkat kemandirian seorang aparatur dalam melakukan pembinaan masyarakat.
2) Kemampuan adalah suatu kemmapuan yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

3) Kemauan adalah tingkat keinginan tenaga aparatur dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, dengan menciptakan gagasan–gagasan atau ide–ide dalam rangka memperlancar tugas yang dilaksanakan.
4) Tanggung jawab adalah sikap pertanggungjawaban yang dimiliki aparatur dalam memberikan laporan terhadap kegiatan yang dilakukan.
5) Sikap adalah tindakan seorang aparatur dalam menentukan langkah dalam menjalankan tugasnya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah suatu kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang diembannya berdasarkan keahlian, kemampuan dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.

5. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 tentang Satpol PP, pengertian satpol PP adalah sebagai berikut :". Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Lebih lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan

teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Selanjutnya menurut Kukuh (2013:12), satpol pp adalah "perangkat satuan keamanan di daerah dalam menegakan peraturan daerah dan bertugas untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman lingkungan". Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

6. Pengertian Ketertiban

Menurut Dai Bachtiar (2006:17), ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan.

Lain lagi menurut Budi Santoso (2011:6), ketertiban merupakan komponen untuk menentukan apakah lingkungan sekitar kita sudah baik atau kurang, bahkan masih kotor. Untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan menyentuh hati. Jika proses penyadaran telah terjadi dan perubahan sikap dan pola pikir terhadap lingkungan telah terjadi,maka dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup,serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup.

Menurut Budi Santoso (2011:27), contoh tata tertib yang berhubungan dengan ketertiban, kebersihan, dan kedisiplinan adalah tertib di sekolah, seperti :

a. menjaga lingkungan kelas, kamar kecil, toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah.
b. tidak merusak alat-alat kebersihan sekolah.
c. wajib membersihkan kelas masing-masing sesuai jadwal piket
d. membuang sampah pada tempatnya.

Sedangkan jenis sanksi yang di berikankepada siswa yang melanggar akan di lakukan pembinaan dengan cara :

a. teguran lisan
b. panggilan orangtua

c. pembinaan wali kelas

d. pembinaan BK

e. pembinaaan kesiswaan

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kertetiban merupakan suatu kondisi dimana suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan.

C. Kerangka Pemikiran

Profesionalisme merupakan kecekatan, kecakapan, atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian). Sedangkan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban merupakan suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan. Dengan demikian bahwa profesionalisme satpol pp sangat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, kondusif, nyaman dan tenteram.

Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, satpol pp akan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik terutama dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3.

Kerangka Pemikiran

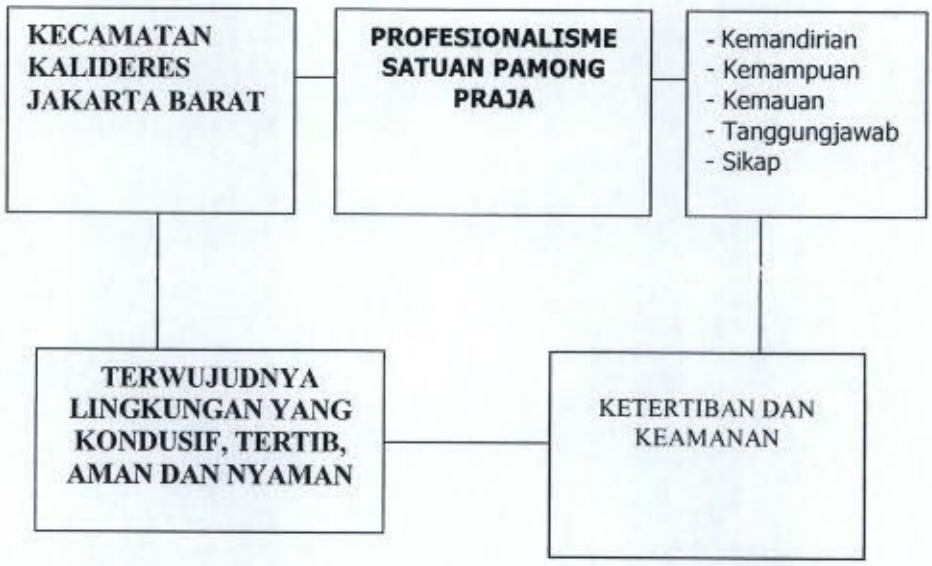

Sumber : Bennet Silalahi, Administrasi Perkantoran, 1997 :21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. M.Antonius Birowo (2004:13) menyebutkan : "Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta".

Selanjutnya, Masri Singarimbun (2005:32) mengemukakan ciri-ciri penelitian deskriptif sebagai berikut :

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah sekarang, pada masalah-masalah faktual.
b. Data yang dikumpulkan dan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering juga disebut metode analitik).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Nopember s/d Desember 2015.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variable tunggal (*single variable)* yaitu Profesionalisme Satpol PP Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Sehingga fokus penelitian ini menjelaskan tentang tingkat profesionalisme satpol pp dalam menjaga ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

D. Unit Analisis dan Informan

1. Unit Analiisis

Dalam suatu penelitian, unit yang akan diteliti dan dianalisis harus ditentukan secara jelas dan pasti agar sasaran penelitian tetap terfokus pada unit yang telah ditentukan untuk diteliti dan dianalisis tersebut. Dalam hal ini Singarimbun (2005:105) menyatakan bahwa Unit Analisis adalah merupakan "Unit yang akan diteliti dan dianalisis", adapun yang akan menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah profesionalisme satpol pp dalam menjaga ketertiban lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selanjutnya, Jalaludin Rakhmat berpendapat bahwa (2003:63) "Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian".

2. Informan

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2003:64) bahwa orang yang dijadikan sumber data dinamakan informan.

Lain lagi menurut Antonius Birowo (2004:21), Informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang informasi, sehingga datanya akan dijadikan sumber data.

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 4 orang informan, yakni : Camat Kalideres, Kasatgaspol Kecamatan Kalideres, Lurah Kalideres dan Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat. Diambilnya 4 informan ini, karena 4 informan tersebut merupakan keterwakilan yang obyektif (ada 2 unsur yaitu : unsur petugas satpol pp sebagai pihak yang dinilai, unsur Camat,Lurah dan RW sebagai pihak yang menilai).

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini digunakan dengan dua cara yaitu melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui : 1) observasi, yaitu pengamatan langsung ke obyek penelitian, dan 2) wawancara,

yakni melakukan interview kepada sumber data/informan yang memiliki informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui satu teknik riset Perpustakaan (library research) untuk melengkapi data primer yang telah penulis dapatkan dari riset lapangan, maka penulis juga mengambil data sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku, literatur, bahan kuliah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian, dikelompokkan, di klasifikasikan, ditabulasikan dan dianalisis menggunakan metode deskripsi.

1. Editing

Data yang diperoleh atau dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing yang merupakan langkah awal dari kegiatan pengolahan data.

2. Koding

Seluruh data yang telah terkumpul dirubah menjadi bentukyang lebih ringkas dengan memberi kode nilai berupa

angka/ huruf terhadap berbagai alternatiif jawaban yang diberikan oleh responden.

3. Tabulasi

Selanjutnya peneliti mentabulasi data yang masuk melalui angket/kuisioner yang dikembalikan, tabulasi ini adalah penyajian data melalui bentuk table/ tabulating.

4. Analisis Deskripsi

Setelah mentabulasi data yang masuk kemudian data yang diperoleh dideskripsi, di analisis dan di simpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dasar Hukum Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol

PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pasal 3

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 16

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

a. pegawai negeri sipil;

b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 3 ayat (2)

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang

Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah,

antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

(Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luaryang diatur dalam Perda

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a. alih tugas;

b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 35

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

B. Pembahasan

1. Peranan Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sangat berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota dan Camat dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kasatgaspol Kecamatan Kalideres (21 Nopember 2015) "Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas".

Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat :

a.Kegiatan operasi

Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tahun 2015 adalah :

1).Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.

2) Operasi Penertiban HO (Hinder Ordonansie) atau Ijin Gangguan dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

3). Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

4). Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

5). Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.

6). Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.

b.Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum.

Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres selama 3 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong Praja.

Dari pengamatan di lapangan, menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kalideres (21 Nopember 2015), bahwa peran Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sangat berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat

menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres (21 Nopember 2015), bahwa Peran Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa peran Polisi Pamong Praja sudah cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore, Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lesan dan tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar.

Secara operasional teguran secara lesan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu di lakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dimana peran dari Polisi Pamong Praja sudah cukup dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan "Peran Polisi Pamong

Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah baik dan cukup berhasil.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional antara lain :

a.Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda

b.Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan

c.Pemanggilan atau teguran.

d.Koordinasi dengan instansi terkait.

e.Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang

f.Kelengkapan administrasi (surat tugas)

g.Pembuataan berita acara pengambilan barang.

h.Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres Jakarta Barat selalu melibatkan dinas atau instansi terkait.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan

Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah yang datangnya bisa didalam (intern) maupun dari luar (external).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartanto Kasatgas Pol PP (11 Nopember 2015) , bahwa Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan". Hambatan hambatan tersebut adalah :

a.Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

b.Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan olehaparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.

c.Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.

d. Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Selain hambatan-hambatan diatas disebutkan juga gangguan-gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu :

a. Gangguan yang di timbulkan oleh alam. Banjir yang menyebabkan berbagai kendala dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dilapangan dan juga sebagai penghambat pembangunan daerah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
b. Gangguan yang di timbulkan oleh manusia. Perkelahian antar Pelajar di juga banyak terjadi di tempat-tempat umum dan hal ini sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota.
d. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen yang banyak dijumpai di jalan terutama di Trafik Light sangat meresahkan pengguna jalan raya.

Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara "Hambatan-hambatan dan gangguan dalam penegakan Peraturan Daerah yang pernah saya tangani dan ketahui adalah masalah sumber daya manusia berupa pelayanan pada masyarakat dan sosial .

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro Korlap Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kalideres (11 Nopember 2015), bahwa "Pelanggaran

Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti gelandangan dan pengamen jika sudah ditangkap beberapa hari berkeliaran lagi di jalan"

Hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan. Hal itu dikuatkan oleh Gunawan Anggota Satpol PP Kecamatan Kalideres (wancara,11 Nopember 2015) bahwa "Pengamen dan Pengemis disini tidak takut sama sekali oleh razia Polisi Pamong Praja, paling kalau ketangkap didata lalu dilepas lagi kalau tidak dengan jaminan keluarga".

Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dilihat dari data yang masuk ke Kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan dibidang sosial budaya menempati urutan pertama, selanjutnya dibidang ekonomi, gangguan yang ditimbulkan manusia dan yang menempati urutan terakhir ditimbulkan oleh alam.

Secara rata-rata 35% gangguan di bidang sosial budaya, 29% oleh faktor ekonomi, gangguan manusia 20%, terakhir yang di timbulkan alam 16%.

Dilihat dari segi aspek hukum Peraturan Daerah, sanksinya memang rendah ditambah lagi menurut penulis di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sangat jarang terjadi pelanggaran Peraturan Daerah yang berat tidak seperti di daerah-daerah besar lainnya.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hartanto Kasargas Pol PP Kecamatan Kalideres (11 Nopember 2015) untuk mengatasi hambatan-hambatan

tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

a.Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pusat sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karena langkah dibidang ketent raman dan ketertiban tidak bersifat kedaerahan akan tetapi bersifat nasional dengan demikian kepanjangan tanganan lembaga Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis di tiap-tiap kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah komando langsung Kantor Polisi Pamong Praja

b.Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja kedepan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perludidukung oleh personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekruitment maupun mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.

c.Jaringan Kerja

Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam gerak operasionalnya harus didukung oleh peraturan-peraturan yang jelas baik dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan yang kuat dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

d.Lingkungan yang Belum Kondusif

Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal.

Untuk penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah guna terciptanya lingkungan yang kondusif.

3. Profesionalisme Satpol PP Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Tingkat profesionalisme Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Kalideres dapat ditelusuri melalui hasil wawancara kepada Camat, Lurah dan Ketua RW dengan menganalisis indikator-indikator variable profesionalisme, sebagai berikut:

a. Kemandirian

Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus Burhan Camat Kalideres (12 Nopember 2015), bahwa tingkat kemandirian Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dinilai cukup baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas memiliki kemandirian yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tidak harus dalam pengawasan pimpinan, para anggota Satpol PP selalu memiliki ide, gagasan dan kreativitas dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Hal ini juga senada diungkapkan oleh Lurah Kalideres Bapak Burhan (Wawancara,12 Nopember 2015), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres rata-rata memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Para anggota Satpol PP ini selalu siap, sigap dan selalu mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Pernyataan tersebut, juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Suharto Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres (12 Mei 2015) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di

wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemandirian yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil wawancara terhadap 3 orang informan di atas yang merupakan unsur penilai terhadap kinerja Satpol PP, dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari tingkat kemandirian Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres cukup baik, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dengan baik.

b. Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kalideres Bapak Yunus Burhan (12 Nopember 2015), bahwa tingkat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai cukup bagus. Hal ini terbukti tingkat penguasaan tugas para anggota Satpol PP rata-rata memadai dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemampuan para anggota Satpol PP ini terlihat setiap kali dalam menghadapi demo masyarakat dan gangguan ketertiban seperti balapan liar dan PKL mampu mengatasi dengan cepat, sehingga suasana kondusif dan ketertiban lingkungan dapat diwujudkan. Pernyataan tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Burhan Lurah Kalideres (12 Nopember 2015), yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemampuan yang handal dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan tepat

dan cepat. Upaya yang dilakukan para anggota Satpol PP ini dengan kemampuan bernegoisasi dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan para pengganggu ketertiban dan keamanan, sehingga ketegangan dan suasana yang panas menjadi kondusif dan dapat dikendalikan.

Pendapat tersebut juga seirima dengan pernyataan Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres Bapak Suharto (Wawancara,12 Nopember 2015) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemampuan yang handal dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kemampuan ini terlihat setiap kali ada permasalahan di wilayah baik di lingkup RT,RW, Kelurahan dan Kecamatan selalu dapat diselesaikan secara tepat dan cepat.

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut di atas, dapat disimpulan bahwa tingkat kemampuan Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan sangat handal dan memadai.

c. Kemauan

Dari hasil Wawancara dengan Bapak Yunus Burhan Camat Kalideres (12 Nopember 2015), bahwa tingkat kemauan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai

sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP memilikia kemauan yang tinggi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan. Para anggota Satpol PP ini mau berbaur dengan masyarakat, PKL, RT,RW dalam rangka mensosialisasikan pentingnya akan ketertiban dan keamanan lingkungan. Para anggota Satpol PP mengandeng para tokoh masyarakat dan bekerjasama dengan Polsek dan Koramil membentuk Siskomas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini senada yang diungkapkan Lurah Kalideres Bapak Burhan (Wawancara,12 Nopember 2015), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu memiliki kemauan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan komunitas yang ada. Para anggota Satpol PP ini selalu punya keinginan dan kemauan mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, indah dan nyaman. Penilaian tersebut juga senada dengan pernyataan Bapak Suharto Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres (Wawancara,12 Nopember 2015) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemauan yang tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan ketertiban dan kemanan lingkungan kepada masyarakat. Kemauan ini seringkali diwujudkan melalui semangat yang tinggi bersama-sama

siskomas dan para ketua RT,RW untuk keliling lingkungan dan memonitor kondisi lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga orang informan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemauan Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan secara komitmen dan baik.

d. Tanggung Jawab

Melalui hasil Wawancara dengan Camat Kalideres yakni Bapak Yunus Burhan (12 Nopember 2015), bahwa tingkat tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP selalu bertanggung jawab atas resiko pekerjaan yang diembannya. Para anggota Satpol PP ini mau menghadapi tantangan, rintangan di lapangan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Para anggota Satpol PP selalu siap sedia dan selalu standbay di titik-titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga gangguan ketertiban lingkungan segera dapat diatasi. Pernyataan tersebut, senada yang diungkapkan Lurah Kalideres Bapak Burhan (Wawancara,12 Nopember 2015), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya. Para anggota Satpol PP selalu berani mengadapi dan menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi di lapangan. Para anggota Satpol PP ini selalu komitmen terhadap tugas tanggung jawabnya, dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, indah dan nyaman. Pendapat tersebut juga seirama dengan pernyataan Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres yakni Bapak Suharto (Wawancara,12 Nopember 2015) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Para anggota Satpol PP ini selalu berani mengadapi resiko pekerjaan, dan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat tanggung jawab Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan sangat tinggi.

e. Sikap

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Camat Kalideres yakni Bapak Yunus Burhan (12 Nopember 2015), bahwa sikap Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP serlalu bersikap persuasive dalam menjalankan tugas. Para anggota Satpol PP dalam menertibkan lingkungan selalu didahului dengan sosialisasi, peringatan

dan teguran. Para anggota Satpol PP ini mau berdiskusi dan berbaur dengan masyarakat, PKL, RT,RW dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan. Setiap kali akan diadakan penertiban, sikap para anggota Satpol PP selalu kekeluargaan, bersahaja dan dengan pendekatan persuasif. Para anggota Satpol PP bersikap ramah dengan mengandeng para tokoh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman.

Hal ini senada yang diungkapkan Bapak Burhan Lurah Kalideres (Wawancara,12 Nopember 2015), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu memiliki sikap yang tegas, dan selalu melalui pendekatan persuasive dalam menertibkan lingkungan.. Para anggota Satpol PP ini selalu bersikap ramah, bersedia diskusi dan musyawarah untuk mencari kata mufakat dengan masyarakat. Pendapat tersebut juga senada dengan pernyataan Bapak Suharto Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres (Wawancara,12 Nopember 2015) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki sikap yang tegas dalam menindak gangguan ketertiban, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres sangat tegas, dan selalu menggunakan pendekatan persuasive dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Berdasarkan pembahasan terhadap tingkat profesionalisme Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Kalideres melalui analisis indikator kemandirian; kemampuan, kemauan; tanggung jawab dan sikap dengan mewawancarai Camat, Lurah dan Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres, pada dasarnya Satpol PP di Lingkungan Kecamatan Kalideres rata-rata profesional dalam menjaga ketertiban dan keamanan linkungan di wilayahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan sudah sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kalideres (21 Nopember 2015), bahwa peran Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat telah berperan baik dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
2. Faktor-faktor apa yang menghabat Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan antara lain :
   a. Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah (yang jauh dari pusat Kota) cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

b. Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan

c. Pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.

d. Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.

e. Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

3. Tingkat profesionalisme Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Kalideres telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari analisis kemandirian; kemampuan, kemauan; tanggung jawab dan sikap Satpol PP dengan informan Camat, Lurah dan Ketua RW 02, rata-rata menyatakan baik.

   a. Dilihat dari tingkat kemandirian Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres menunjukan baik, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dengan baik.

b. Dilihat dari tingkat kemampuan Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan sangat handal dan memadai.

c. Dari tingkat kemauan Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan telah berjalan secara komitmen dan baik

d. Dilihat dri tingkat tanggung jawab Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan, menunjukkan sangat tinggi.

e. Dari tingkat sikap Satpol PP di wilayah Kecamatan Kalideres menunjukkan sangat tegas dan selalu menggunakan pendekatan persuasive dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan peran Satpol PP Kecamatan Kalideres dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan, disarankan agar Satpol PP diberikan pemahaman dan sosialllisssasi secara mendalllam terhadap semua

peraturan daerah khususnya yang terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan, sehingga para anggota Satpol PP memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama dan merata.

2. Untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan, disarankan agar faktor-faktor penentu seperti kelembagaan; sumber daya manusia; pelayanan; jaringan kerja; dan lingkungan yang kondusif dijadikan prioritas dan ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih sinigfikan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Dimensi-dimensi yang mendukung terhadap tingkat profesionalisme Satpol PP seperti : kemandirian; kemampuan, kemauan; tanggung jawab dan sikap, agar ditingkatkan supaya dapat lebih memberikan keberhasilan dalam mewujudkan ketertiban dan kemanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong dan Baronn Dalam Suwarno Handayaningrat, (1998), *Behavioral Competencies*, Jakarta : Gunung Agung

Atmosudirjo, Prajudi, (1996), *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta : Gunung Agung

Arifin Abdulrahman, (1997), *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta : Gunung Agung

Hasibuan Malayu, (2000), *Perilaku Organisasi*, Balai Pustaka.

Handayaningrat, Soewarno, (1992), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.

_____, (1996), *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta : Gunung Agung.

_____, (1998), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Balai Pustaka.

Sarwoto, (1994), *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian S.P., (1997), *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung

Silalahi Bennet (1997), *Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Gunung Agung

Spencer., (1993), *Behavioral Organitations,* Jakarta: Miswar.

Soekarno. K., (1999), *Dasar-Dasar Manajemen,* Jakarta: Miswar.

Soerjadi, (1995), *Efektivitas Organisasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subandri S Hardhoyo, (1997), *Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suwarno, (2013), *Administrasi Perkantoran,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepardi, (1991), *Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Rajawali Press.

Sugiyono, (2003), *Metode Penelitian Bisnis,* Jakarta, Rineka

Suhartini, Arikunto, (1990), *Metode Riset*, Jakarta, Grafindo.

Terry, R. George,(1995), *Asas-asas Management* terjemahan Soewarno Handayaningrat, Jakarta: CV. Mas Agung

The Liang Gie. (1992), *Ensiklopedia Administrasi,* Jakarta : Gunung Agung.

Toha, Miftah, (1989), *Administrasi Materiil*, Jakarta, Rineka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : **Yunus Burhan**
Jabatan : **Camat Kalideres Jakarta Barat**

1. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemandirian Satpol PP?

   Jawab :
   Tingkat kemandirian Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dinilai cukup baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas memiliki kemandirian yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tidak harus dalam pengawasan pimpinan, para anggota Satpol PP selalu memiliki ide, gagasan dan kreativitas dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman.

2. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemampuan Satpol PP?

   Jawab :
   Tingkat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai cukup bagus. Hal ini terbukti tingkat penguasaan tugas para anggota Satpol PP rata-rata memadai dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemampuan para anggota Satpol PP ini terlihat setiap kali dalam menghadapi demo masyarakat dan gangguan ketertiban seperti balapan liar dan PKL mampu mengatasi dengan cepat, sehingga suasana kondusif dan ketertiban lingkungan dapat diwujudkan.

3. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemauan Satpol PP?

Jawab :

Tingkat kemauan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP memilikia kemauan yang tinggi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan. Para anggota Satpol PP ini mau berbaur dengan masyarakat, PKL, RT,RW dalam rangka mensosialisasikan pentingnya akan ketertiban dan keamanan lingkungan. Para anggota Satpol PP mengandeng para tokoh masyarakat dan bekerjasama dengan Polsek dan Koramil membentuk Siskomas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

4. **Pertanyaan**

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi tanggung jawab Satpol PP?

Jawab :

Tingkat tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP selalu bertanggung jawab atas resiko pekerjaan yang diembannya. Para anggota Satpol PP ini mau menghadapi tantangan, rintangan di lapangan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Para anggota Satpol PP selalu siap sedia dan selalu standbay di titik-titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga gangguan ketertiban lingkungan segera dapat diatasi

5. **Pertanyaan**

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi sikap Satpol PP?

Jawab :

Sikap Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres dalam menjalankan tugasnya dinilai sangat baik. Hal ini terbukti para anggota Satpol PP serlalu bersikap persuasive dalam menjalankan tugas. Para anggota Satpol PP dalam menertibkan lingkungan selalu didahului dengan sosialisasi, peringatan dan teguran. Para anggota Satpol PP ini mau berdiskusi dan berbaur dengan masyarakat, PKL, RT,RW dalam rangka mewujudkan ketertiban lingkungan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : **Burhan**
Jabatan : **Lurah Kalideres**

1. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemandirian Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres rata-rata memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Para anggota Satpol PP ini selalu siap, sigap dan selalu mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.

2. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemampuan Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemampuan yang handal dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan tepat dan cepat. Upaya yang dilakukan para anggota Satpol PP ini dengan kemampuan bernegoisasi dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan para pengganggu ketertiban dan keamanan, sehingga ketegangan dan suasana yang panas menjadi kondusif dan dapat dikendalikan.

3. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemauan Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu memiliki kemauan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan komunitas yang ada. Para anggota Satpol PP ini selalu punya keinginan dan kemauan mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, indah dan nyaman

4. **Pertanyaan**

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi tanggung jawab Satpol PP?

Jawab :

Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya. Para anggota Satpol PP selalu berani mengadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Para anggota Satpol PP ini selalu komitmen terhadap tugas tanggung jawabnya, dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, indah dan nyaman.

5. **Pertanyaan**

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi sikap Satpol PP?

Jawab :

Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres selalu memiliki sikap yang tegas, dan selalu melalui pendekatan persuasive dalam menertibkan lingkungan.. Para anggota Satpol PP ini selalu bersikap ramah, bersedia diskusi dan musyawarah untuk mencari kata mufakat dengan masyarakat.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : **Suharto**
Jabatan : **Ketua RW 02 Kelurahan Kalideres**

1. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemandirian Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemandirian yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemampuan Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemampuan yang handal dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kemampuan ini terlihat setiap kali ada permasalahan di wilayah baik di lingkup RT,RW, Kelurahan dan Kecamatan selalu dapat diselesaikan secara tepat dan cepat.

3. **Pertanyaan**
   Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi kemauan Satpol PP?

   Jawab :
   Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki kemauan yang tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan ketertiban dan kemanan lingkungan kepada masyarakat. Kemauan ini seringkali diwujudkan melalui semangat yang tinggi bersama-sama siskomas dan

para ketua RT,RW untuk keliling lingkungan dan memonitor kondisi lingkungan.

4. Pertanyaan

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Daiam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi tanggung jawab Satpol PP?

Jawab :

Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman. Para anggota Satpol PP ini seialu berani mengadapi resiko pekerjaan, dan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

5. **Pertanyaan**

Bagaimana tingkat Profesionalisme Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat dilihat dari segi sikap Satpol PP?

Jawab :

Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kecamatan Kalideres memiliki sikap yang tegas dalam menindak gangguan ketertiban, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan nayaman. Para anggota Satpol PP ini selalu beradaptasi, berdiskusi dan mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.